

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan hasil penelitian terkait dengan deskripsi tingkat pengembalian kuesioner, profil responden, statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji validitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

##### 4.1.1 Deskripsi Data

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan kriteria responden yaitu bendahara, PPK, atau PPTK. Data penelitian yang di kumpulkan berupa kuesioner yang disebar langsung ke seluruh responden atau SKPD yang bersangkutan. Kuesioner tersebut ditinggal dan diambil kembali antara 2 hari sampai 10 hari setelah kuesioner tersebut diserahkan.

**Tabel 4.1**  
**Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Total kuesioner yang disebar	36	100 %
Jumlah kuesioner yang kembali	36	100 %
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	-	-
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	1	2.78%
Kuesioner yang dapat digunakan	35	97.2 %

*Sumber: Data diolah, 2014*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 36 (100%) kuesioner yang disebar terdapat 36 (100%) kuesioner yang kembali. Dari 36 kuesioner yang kembali terdapat 1 (2.78%) kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 35 kuesioner (97.2%).

#### 4.1.2 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai bagian pengelola keuangan pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan kriteria yaitu Bendahara, PPK atau PPTK yang mewakili masing-masing SKPD. Berdasarkan data yang diperoleh dari 35 kuesioner yang dapat diolah, diperoleh informasi mengenai identitas responden yaitu meliputi jenis kelamin, umur, jabatan, lama bekerja dan pendidikan terakhir. Adapun gambaran mengenai demografi responden secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Deskripsi Responden**

<b>Profil Responden</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Presentase ( % )</b>
Jenis Kelamin:		
1. Laki-laki	14	40%
2. Perempuan	21	60%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>
Umur:		
1. 20-30	5	14,3%
2. 31-40	10	28,6%
3. 41-50	16	45,7%
4. > 51	4	11,4%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>

<b>Profil Responden</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>
<b>Jabatan:</b>		
1. Bendahara	23	65,7%
2. PPK	4	11,4%
3. PPTK	8	22,9%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>
<b>Lama Jabatan:</b>		
1. < 5 Tahun	12	34,3%
2. 5 - 10 Tahun	19	54,3%
3. > 10 Tahun	4	11,4%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>
<b>Pendidikan Terakhir:</b>		
1. SMA	3	8,6%
2. Diploma	4	11,4%
3. Sarjana ( S-1 )	23	65,7%
4. Sarjana ( S-2 )	5	14,3%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Primer yang diolah, 2014**

Pada tabel 4.2 diatas dilihat dari usia masing-masing responden, sebagian besar berusia 41-50 tahun sebanyak 16 orang (45,7%), karena usia antara 41-50 adalah usia yang produktif untuk melaksanakan tugas. Jenis kelamin responden didominasi oleh perempuan sebanyak 21 orang (60%) dan laki-laki sebanyak 14 orang (40%), hal ini dikarenakan perempuan lebih teliti daripada laki-laki dalam masalah keuangan.

Tingkat jabatan dari masing-masing responden bendahara sebanyak 23 orang (65,7%), PPK sebanyak 4 orang (11,4%) dan PPTK sebanyak 8 orang (22,9%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian jabatan bendahara.

Mayoritas responden bekerja 5 - 10 tahun sebanyak 19 orang (54,3%). Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja dapat menunjukkan pemahaman

akuntansi pegawai pengelola keuangan sehingga laporan keuangan yang di hasilkan maksimal dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin tinggi. Pendidikan masing-masing responden sebagian besar adalah S1 yaitu sebanyak 23 orang (65,7%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah memiliki pemahaman akuntansi yang baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### 4.1.3 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel penelitian yang terdiri dari kisaran teoritis masing-masing pernyataan dan kisaran actual, mean dan standar deviasi yang disajikan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Kisaran Teoritis		Mean Teoritis	Kisaran Aktual		Mean Aktual	Standar Deviasi
		Minimum	Maksimum		Minimum	Maksimum		
SAPD	35	6.00	30.00	18.00	24.00	30.00	26.0571	1.84619
PA	35	10.00	50.00	30.00	37.00	50.00	43.7714	3.82011
KPPP	35	5.00	25.00	15.00	19.00	25.00	22.2571	1.93030
AKIP	35	10.00	50.00	30.00	40.00	50.00	45.6000	3.90475

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2014*

Tabel 4.3 diatas merupakan variabel-variabel penelitian yaitu: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Pemahaman Akuntansi (PA), Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (KPPP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang menunjukkan kisaran teoritis dan kisaran aktual serta standar deviasi.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat terlihat bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai independen variabel memiliki nilai mean aktual 26.0571 lebih besar dari mean teoritis 18.00 yang menandakan bahwa SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik. Apabila sistem akuntansi pemerintah daerah diterapkan dengan baik maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Hal ini disebabkan oleh indikator sistem akuntansi pemerintah daerah yang meliputi: pencatatan, penggolongan, dan pelaporan. Standar deviasi pada variabel sistem akuntansi pemerintah daerah sebesar 1.84619 dengan ini menandakan bahwa jawaban responden tidak bervariasi.

Variabel pemahaman akuntansi juga terlihat bahwa nilai mean aktual sebesar 43.7714 lebih besar dari mean teoritis 50.00. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik. Unsur yang terdapat pada pemahaman akuntansi yaitu Standar Akuntansi Pemerintah telah diterapkan dengan baik di Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Standar deviasi pada variabel pemahaman akuntansi sebesar 3.82011 ini menandakan jawaban responden tidak bervariasi.

Variabel ketaatan pada peraturan perundangan juga terlihat bahwa nilai mean aktual sebesar 22.2571 lebih besar dari mean teoritis 15.00. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik. Standar deviasi pada variabel ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 1.93030 ini menandakan jawaban responden tidak bervariasi.

Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen terlihat bahwa rata-rata jawaban responden memiliki nilai mean aktual sebesar 45.6000 lebih kecil dari mean teoritis 50.00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik. Standar deviasi sebesar 3.90475 ini menandakan bahwa jawaban dari responden tidak bervariasi.

**Tabel 4.4**  
**Frekuensi**

	SAPD	PA	KPPP	AKIP
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	1,43%	3,71%	4%	-
4	61,90%	54,56%	46,86%	44%
5	36,67%	41,71%	49,14%	56%

*Sumber : Data Primer diolah 2014*

Dari tabel 4.4 menunjukkan persentase jawaban responden terhadap pernyataan variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada variabel sistem akuntansi pemerintah daerah menunjukkan bahwa responden menjawab pernyataan dengan nilai 3,4 dan 5. Persentase tertinggi pada nilai 4 dengan persentase sebesar 61,90%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik.

Pada variabel pemahaman akuntansi, responden menjawab pernyataan dengan nilai 3,4 dan 5. Persentase terbesar pada variabel pemahaman akuntansi yaitu pada nilai 4 dengan persentase sebesar 54,56%. Hal ini berate menunjukkan

bahwa pemahaman akuntansi pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga baik.

Pada variabel ketaatan pada peraturan perundangan responden menjawab pernyataan dengan nilai 3,4,dan 5. Persentase terbesar yaitu pada nilai 5 sebesar 49,14%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan para pegawai di SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah telah mentaati peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan.

Pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah responden menjawab dengan nilai 4 dan 5. Persentase terbesar yaitu jawaban dengan nilai 5 sebesar 56%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik.

#### **4.1.4 Hasil Uji Kualitas Data**

##### **4.1.4.1 Hasil Uji Reliabilitas**

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) untuk instrumen penelitian yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masing-masing memiliki nilai lebih besar dari 0.70 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item instrument untuk masing-masing variabel adalah *reliable*. Hasil Uji Realibilitas disajikan pada Tabel 4.5

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach Alpha</i></b>	<b>Keterangan</b>
-----------------	------------------------------	-------------------

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0.705	<i>Reliable</i>
Pemahaman Akuntansi	0.909	<i>Reliable</i>
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0.784	<i>Reliable</i>
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.927	<i>Reliable</i>

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2014*

#### 4.1.4.2 Hasil Uji Validitas

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *pearson correlation*. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa data kuisisioner yang digunakan adalah valid.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pearson Colleration (Validitas)	Signifikan	Keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0.538** - 0.757**	0.001 – 0.000	Valid
Pemahaman Akuntansi	0.561** - 0.852**	0.000 – 0.000	Valid
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0.587** - 0.838**	0.000 – 0.000	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.506** - 0.933**	0.002 – 0.000	Valid

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2014*

Hasil uji validitas untuk ke-6 butir item pertanyaan sistem akuntansi pemerintah daerah pada Tabel 4.6 adalah sebesar 0.538 untuk nilai koefisien korelasi terendah dan 0.757 untuk nilai koefisien korelasi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ke-6 butir item pertanyaan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah valid untuk mengukur variabel sistem akuntansi pemerintah daerah.

*Pearson Correlation* untuk ke-10 butir item pertanyaan pemahaman akuntansi menunjukkan nilai 0.561 untuk nilai koefisien korelasi terendah dan



0.852 untuk nilai koefisien korelasi tertinggi. Angka ini diatas signifikansi yang berada pada level 0.05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-10 butir pernyataan dinyatakan valid untuk mengukur variabel pemahaman akuntansi.

Hasil uji validitas untuk ke-5 butir item pertanyaan variabel ketaatan pada peraturan perundangan menunjukkan nilai 0.587 untuk nilai koefisien terendah dan 0.838 untuk nilai koefisien korelasi tertinggi. Hasil uji *Pearson Correlation* ini menunjukkan bahwa ke-5 butir item pertanyaan adalah valid.

Tabel 4.6 menunjukkan nilai ke-10 butir pertanyaan untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0.506 untuk koefisien korelasi terendah dan 0.933 untuk koefisien korelasi tertinggi. Angka ini diatas signifikansi yang berada pada level 0.05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-10 butir pernyataan dikatakan valid untuk mengukur variabel akuntabilitas kinerja.

#### **4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik**

##### **4.1.5.1 Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas non parametrik yaitu *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test*.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Normalitas**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Variabel	Kolmogorov-Smirnov-Test	Asymp.Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	1.117	0.165	Distribusi Normal
Pemahaman Akuntansi	0.939	0.342	Distribusi Normal
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0.935	0.346	Distribusi Normal
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.231	0.097	Distribusi Normal

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2014*

Pada tabel 4.7 pengujian Normalitas dengan *Uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Test* tersebut, data terdistribusi secara normal jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0.05 (5%). Hasil pengujian normalitas data dengan *Uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Test*, menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* untuk sistem akuntansi pemerintah daerah sebesar  $0.165 > 0.05$ , pemahaman akuntansi sebesar  $0.342 > 0.05$ , ketaatan pada peraturan perundangan sebesar  $0.346 > 0,05$ , dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar  $0.097 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

#### **4.1.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi  $> 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ ,

artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Hasil dari pengujian multikolinieritas disajikan pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Akuntansi	0.603	1.658	Bebas Multikolinieritas
Pemahaman Akuntansi	0.351	2.849	Bebas Multikolinieritas
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0.480	2.085	Bebas Multikolinieritas

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2014*

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas yang dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai VIF pada Tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

#### **4.1.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas yaitu dilakukan analisis dengan menggunakan uji *Glejser* dengan ketentuan jika koefisien korelasi semua variabel terhadap residual > 0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 4.9 menunjukkan nilai signifikansi dari uji *Glejser* untuk kesemua variabel independen.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

<b>Variabel</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0. 535	Bebas Heteroskedastisitas
Pemahaman Akuntansi	0. 214	Bebas Heteroskedastisitas
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0.077	Bebas Heteroskedastisitas

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2014*

Berdasarkan hasil pengujian heterokedastisitas, nilai signifikansi dari uji *Glejser* berturut-turut untuk variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada pertauran perundangan adalah 0.535, 0,214 dan 0.07. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

#### **4.1.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis penelitian dilakukan terhadap hasil perhitungan dan pengujian data primer dari koeisioner yang disebarkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda melalui program SPSS versi 16.00. Berdasarkan *output* SPSS, hasil analisis regresi disajikan pada Tabel 4.10.

**Tabel 4.10.**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

<b>Variabel</b>	<b>Koef Regresi</b>	<b>t hitung</b>	<b>Sig</b>
Konstanta	- 7.690	- 1.763	0.088
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0.662	3.443	0.002
Pemahaman akuntansi	0.394	3.115	0.004
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0.821	3.810	0.001

R Square	0.845
Adjusted R <sup>2</sup>	0.830
F	56.238
Sig	0.000

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2014*

#### **4.1.6.1 Hasil Uji F**

Hasil Uji F pada Tabel 4.10 menunjukkan nilai 56.238 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 karena nilai signifikansi (*p-value*) data analisis lebih kecil dari 0.05, maka model regresi pada data analisis dapat digunakan atau sesuai untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai signifikansi 0.000 uji F juga menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **4.1.6.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Tabel 4.10 menunjukkan nilai nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.83. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel independen yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan mampu menjelaskan sebesar 83% terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja.

#### **4.1.7 Hasil Uji Hipotesis ( Uji t )**

##### **4.1.7.1 Pengujian Hipotesis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah**

Hasil uji regresi secara parsial pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( $H_1$ ) menunjukkan nilai  $\beta_1$  sebesar 0.662 yang berarti terdapat hubungan positif penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai statistik  $t$  menunjukkan nilai 3.443 dengan tingkat signifikansi 0.002, dengan tingkat signifikansi penerimaan hipotesis  $< 0.05$  maka hipotesis pertama dalam penelitian ini **diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

##### **4.1.7.2 Pengujian Hipotesis Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil uji regresi secara parsial pengaruh pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( $H_2$ ) menunjukkan nilai  $\beta_1$  sebesar 0.394 yang berarti terdapat hubungan positif pemahaman akuntansi dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai statistik  $t$  menunjukkan nilai 3.115 dengan tingkat signifikansi 0.004, dengan tingkat signifikansi penerimaan hipotesis  $< 0.05$  maka hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi akan berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **4.1.7.3 Pengujian Hipotesis Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil uji regresi secara parsial pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( $H_3$ ) menunjukkan nilai  $\beta_1$  sebesar 0.821 yang berarti terdapat hubungan positif ketaatan pada peraturan perundangan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai statistik  $t$  menunjukkan nilai 3.810 dengan tingkat signifikansi 0.001, dengan tingkat signifikansi penerimaan hipotesis  $< 0.05$  maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini **diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketaatan pada peraturan perundangan akan berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah maka akan semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Unsur-unsur yang terkandung dalam sistem akuntansi pemerintah daerah berfungsi sebagai tolak ukur pengujian sistem akuntansi pemerintah daerah dalam penelitian ini. Ketiga unsur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu pencatatan, penggolongan, dan pelaporan. Apabila semua unsur tersebut dilaksanakan dalam pembuatan laporan keuangan maka laporan yang dihasilkan akan baik. Penggunaan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan bertujuan agar suatu institusi tertib administrasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut memungkinkan adanya perlakuan akuntansi yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat.

Dari hasil jawaban responden pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah proses pencatatan sudah diterapkan dengan baik. Dimana pegawai telah mengimplementasikan empat prosedur dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi asset, dan akuntansi selain aset. Namun dilihat dari statistik deskriptif, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik. Hal ini dapat dilihat mean aktual sistem akuntansi pemerintah daerah sebesar 26.0571 lebih besar dari mean teoritis sebesar 18.00. Sedangkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah, hal ini



dapat dilihat mean aktual akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 45.6000 lebih besar dari mean teoritis sebesar 30.00.

Hasil penelitian memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan Sumiati (2012) yang berhasil membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **4.2.2 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

##### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik pemahaman akuntansi para aparat pemerintah daerah maka akan semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah di perlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar akuntansi pemerintah yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) penting untuk diterapkan dalam menyusun laporan keuangan , karena standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas. Dengan laporan keuangan yang berkualitas maka akan semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari hasil jawaban responden pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah pemahaman akuntansi sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat mean aktual pemahaman akuntansi sebesar 43.7714 lebih besar dari mean teoritis sebesar 30.00. Sedangkan dilihat dari standar deviasi pemahaman akuntansi sebesar 3.82011 lebih kecil dari mean aktualnya. Dilihat dari persentase frekuensi, rata-rata responden menjawab dengan nilai 4 dengan persentase sebesar 54,56%.

Hasil penelitian pada pengujian hipotesis kedua memberikan bukti bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan Apriyani (2012) yang berhasil membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi akan berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **4.2.3 Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik ketaatan pada peraturan perundangan para aparat pemerintah daerah maka akan semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *civil law* atau *common law*. Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah

sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Aparat publik diwajibkan untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program sehingga tercapainya sasaran atau tujuan yang dikehendaki yang akan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari hasil jawaban responden pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah ketaatan pada peraturan perundangan sudah diterapkan dengan baik. Dimana para pegawai di SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah dalam penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. Namun dilihat dari statistik deskriptif, ketaatan pada peraturan perundangan di SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap pegawainya sudah baik. Hal ini dapat dilihat mean aktual ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 22.2571 lebih besar dari mean teoritis sebesar 15.00. Sedangkan dari persentase jawaban responden, rata-rata menjawab dengan nilai 5 yaitu sebesar 56%.

Dalam penelitiannya, Soleman (2007) berpendapat bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan terhadap perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga berhasil membuktikan bahwa ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini mendukung penelitian yang

dilakukan oleh Sumiati (2012), Riantiarno & Azlina (2011) dan Zirman (2010) yang berhasil membuktikan bahwa ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data melalui SPSS diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah maka semakin tingginya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 2) Pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi maka semakin tingginya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 3) Ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketaatan pada peraturan perundangan maka

semakin tingginya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

## **5.2 Implikasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mempunyai implikasi sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu perlu diterapkan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan. Semakin baik penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan maka tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat juga memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam kaitannya dengan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah hendaknya melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan. Dalam menjamin konsisten pelaporan keuangan daerah hendaknya SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan

kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah.

- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa mendatang.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memerlukan beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya, antara lain:

- 1) Dari 40 SKPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, peneliti hanya menyebarkan kuesioner pada 36 SKPD saja. Hal ini dikarenakan jarak dan lokasi SKPD yang tidak terjangkau.
- 2) Dari 36 kuesioner yang di sebar, ada 1 kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap sehingga kuesioner tersebut tidak dapat digunakan.

### **5.4 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya**

Adapun saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Untuk hasil yang lebih baik, perlu ditambahkan metode lain selain penyebaran kuesioner seperti metode wawancara/interview untuk mendukung penjelasan hasil penelitian.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyebarkan kuesioner di seluruh Kabupaten Bengkulu Tengah.



**Lampiran 1**  
**KUISIONER PENELITIAN**  
**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH**  
**DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETAATAN PERATURAN**  
**PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Yth. Bapak/Ibu Responden

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuisisioner ini. Kuisisioner ini dibuat untuk meneliti “ Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah”. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar.

Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya. Atas waktu dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

## **IDENTITAS RESPONDEN**

- Nama : ..... (boleh tidak diisi).
- Jenis Kelamin :  Laki-laki                       Perempuan
- Umur : .....
- Badan/Dinas : .....
- Jabatan : .....
- Lama menjabat : .....
- Pendidikan terakhir :  SMA                       S2  
 Diploma                       S3  
 S1                       lainnya

## **DAFTAR PERTANYAAN**

Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian mengenai pernyataan-pernyataan berikut dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom pilihan yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima), sesuai dengan skala yang menurut Bapak/Ibu paling tepat. Skor jawabannya adalah sebagai berikut :

1. STS                      = Sangat Tidak Setuju
2. TS                      = Tidak Setuju
3. N                      = Netral
4. S                      = Setuju
5. SS                      = Sangat Setuju

### A. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Dalam menjamin konsisten pelaporan keuangan daerah saya menggunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penerapan SAPD					
2.	Bukti memorial, Surat Tanda Setoran, dan Surat Perintah Pencairan Dana merupakan bukti yang saya gunakan dalam pencatatan transaksi keuangan					
3.	Saya mengimplementasikan empat prosedur dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset dan akuntansi selain aset					
4.	Dalam melakukan pencatatan saya melampirkan bukti pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan prosedur penerimaan kas,					
5.	Saya mencatat bukti transaksi dan menggolongkannya ke dalam buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu sebagai dokumen penjurnalan dan meringkas transaksi keuangan					
6.	Instansi tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.					

## B. Pemahaman Akuntansi

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan.					
2.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.					
3.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan komponen-komponen laporan keuangan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.					
4.	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan					
5.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010					
6.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan PSAP No.3 yaitu menyajikan laporan keuangan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.					

7.	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.					
8.	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan PSAP No. 6 yaitu disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset dan kewajiban dan ekuitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010					
9.	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan PSAP No. 7 yaitu suatu asset dapat diakui jika memenuhi definisi dan kriteria dari pengakuan asset yang ada dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.					
10.	Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan dari entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan SAP agar mencerminkan satu kesatuan entitas.					

### C. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik saya mentaati peraturan perundangan yang berlaku					
2.	Bagi pejabat penanggungjawaban yang tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi (hukuman).					
3.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.					
4.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur PP No. 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					
5.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur Permendagri No. 21					

Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah.					
---	--	--	--	--	--

#### D. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
2.	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin					
3.	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
4.	Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.					
5.	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
6.	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.					
7.	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					
8.	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					
9.	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.					
10.	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					

**Lampiran 2**  
**TABULASI SKOR ITEM KUISIONER**

**SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

<b>No</b>	<b>SAPD1</b>	<b>SAPD2</b>	<b>SAPD3</b>	<b>SAPD4</b>	<b>SAPD5</b>	<b>SAPD6</b>	<b>SAPD</b>
1	5	5	5	5	5	5	30
2	4	4	4	5	5	4	26
3	4	5	5	4	4	5	27
4	5	5	4	5	5	4	28
5	4	4	5	5	4	5	27
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	5	5	3	5	5	28
8	4	4	4	5	4	4	25
9	5	4	5	4	4	5	27
10	4	4	4	5	5	4	26
11	4	5	5	4	4	4	26
12	5	4	4	3	4	5	25
13	4	5	4	4	4	4	25
14	5	4	5	4	4	5	27
15	4	4	4	5	5	4	26
16	4	5	4	3	4	4	24
17	4	4	5	5	5	5	28
18	4	5	4	4	4	4	25
19	5	4	5	5	4	4	27
20	4	4	4	4	4	4	24
21	5	4	5	5	4	5	28
22	4	4	4	4	5	4	25
23	4	4	5	4	4	4	25
24	4	5	4	5	4	5	27
25	4	4	4	4	5	4	25
26	4	4	5	4	4	4	25
27	5	5	4	5	5	5	29
28	5	5	5	5	5	4	29
29	4	4	4	4	4	4	24
30	5	5	5	5	5	5	30
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24





**Lampiran 4**  
**KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN**

<b>No</b>	<b>KPPP1</b>	<b>KPPP2</b>	<b>KPPP3</b>	<b>KPPP4</b>	<b>KPPP5</b>	<b>KPPP</b>
1	5	5	5	4	5	24
2	4	5	4	5	4	22
3	4	4	5	4	5	22
4	5	5	4	5	5	24
5	4	4	5	4	4	21
6	5	5	4	5	5	24
7	5	4	5	4	4	22
8	4	5	5	5	4	23
9	5	4	4	5	5	23
10	4	5	5	4	4	22
11	5	4	3	3	5	20
12	5	5	5	5	4	24
13	4	5	5	4	5	23
14	5	4	3	3	4	19
15	5	5	5	5	3	23
16	4	4	4	4	3	19
17	5	5	3	5	5	23
18	4	4	4	4	5	21
19	5	5	5	5	4	24
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	5	5	25
22	4	4	5	4	4	21
23	5	4	4	4	5	22
24	5	5	5	5	5	25
25	4	4	5	4	4	21
26	5	4	4	4	5	22
27	4	4	4	4	4	20
28	5	5	5	5	5	25
29	4	4	4	4	4	20
30	5	5	5	5	5	25
31	4	4	4	4	4	20
32	5	5	5	5	5	25
33	4	4	4	4	4	20
34	5	5	5	5	5	25
35	4	4	4	4	4	20



**Lampiran 6.**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAPD	35	24.00	30.00	26.0571	1.84619
PA	35	37.00	50.00	43.7714	3.82011
KPPP	35	19.00	25.00	22.2571	1.93030
AKIP	35	40.00	50.00	45.6000	3.90475
Valid N (listwise)	35				

**Statistics**

		SAPD1	SAPD2	SAPD3	SAPD4	SAPD5	SAPD6
N	Valid	35	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4.3143	4.3429	4.4000	4.3143	4.3429	4.3429
Std. Deviation		.47101	.48159	.49705	.63113	.48159	.48159
Minimum		4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

**SAPD1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	24	68.6	68.6	68.6
	5	11	31.4	31.4	100.0
Total		35	100.0	100.0	

**SAPD2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	23	65.7	65.7	65.7
	5	12	34.3	34.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**SAPD3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	21	60.0	60.0	60.0
	5	14	40.0	40.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**SAPD4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	8.6	8.6	8.6
	4	18	51.4	51.4	60.0
	5	14	40.0	40.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**SAPD5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	23	65.7	65.7	65.7
	5	12	34.3	34.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**SAPD6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	23	65.7	65.7	65.7
	5	12	34.3	34.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**Statistics**

		PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9	PA10
N	Valid	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mean	4.2571	4.2857	4.4000	4.4571	4.4286	4.4857	4.4571	4.4286	4.3429	4.2286
	Std. Deviation	.56061	.51856	.55307	.56061	.60807	.50709	.56061	.55761	.59125	.54695
	Minimum	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

**PA1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.7	5.7	5.7
	4	22	62.9	62.9	68.6
	5	11	31.4	31.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**PA2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	2.9	2.9	2.9
	4	23	65.7	65.7	68.6
	5	11	31.4	31.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**PA3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	2.9	2.9	2.9
	4	19	54.3	54.3	57.1
	5	15	42.9	42.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**PA4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	2.9	2.9	2.9
	4	17	48.6	48.6	51.4
	5	17	48.6	48.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**PA5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.7	5.7	5.7
	4	16	45.7	45.7	51.4

	5	17	48.6	48.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**PA6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	18	51.4	51.4	51.4
	5	17	48.6	48.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**PA7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	2.9	2.9	2.9
	4	17	48.6	48.6	51.4
	5	17	48.6	48.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**PA8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	2.9	2.9	2.9
	4	18	51.4	51.4	54.3
	5	16	45.7	45.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**PA9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	3	2	5.7	5.7	5.7
	4	19	54.3	54.3	60.0
	5	14	40.0	40.0	100.0
Total		35	100.0	100.0	

### PA10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.7	5.7
	4	23	65.7	71.4
	5	10	28.6	100.0
Total		35	100.0	

### Statistics

	KPPP1	KPPP2	KPPP3	KPPP4	KPPP5
N					
Valid	35	35	35	35	35
Missing	0	0	0	0	0
Mean	4.5429	4.4857	4.4286	4.3714	4.4286
Std. Deviation	.50543	.50709	.65465	.59832	.60807
Minimum	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

### KPPP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	16	45.7	45.7
	5	19	54.3	100.0
Total		35	100.0	



**KPPP2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	18	51.4	51.4	51.4
	5	17	48.6	48.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**KPPP3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	8.6	8.6	8.6
	4	14	40.0	40.0	48.6
	5	18	51.4	51.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**KPPP4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.7	5.7	5.7
	4	18	51.4	51.4	57.1
	5	15	42.9	42.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**KPPP5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.7	5.7	5.7
	4	16	45.7	45.7	51.4
	5	17	48.6	48.6	100.0

**KPPP5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.7	5.7	5.7
	4	16	45.7	45.7	51.4
	5	17	48.6	48.6	100.0
Total		35	100.0	100.0	

**Statistics**

		AKIP1	AKIP2	AKIP3	AKIP4	AKIP5	AKIP6	AKIP7	AKIP8	AKIP9	AKIP10
N	Valid	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mean	4.5143	4.5429	4.5429	4.5714	4.5714	4.5714	4.6000	4.5714	4.6000	4.5143
	Std. Deviation	.50709	.50543	.50543	.50210	.50210	.50210	.49705	.50210	.49705	.50709
	Minimum	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

**AKIP1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	17	48.6	48.6	48.6
	5	18	51.4	51.4	100.0
Total		35	100.0	100.0	

**AKIP2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	16	45.7	45.7	45.7
	5	19	54.3	54.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

### AKIP3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	16	45.7	45.7	45.7
	5	19	54.3	54.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

### AKIP4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	15	42.9	42.9	42.9
	5	20	57.1	57.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

### AKIP5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	15	42.9	42.9	42.9
	5	20	57.1	57.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**AKIP6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	15	42.9	42.9	42.9
	5	20	57.1	57.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**AKIP7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	14	40.0	40.0	40.0
	5	21	60.0	60.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**AKIP8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	15	42.9	42.9	42.9
	5	20	57.1	57.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**AKIP9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	14	40.0	40.0	40.0
	5	21	60.0	60.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**AKIP10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	17	48.6	48.6	48.6
	5	18	51.4	51.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**Lampiran 7.**  
**UJI VALIDITAS**

**Validitas variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**  
**Correlations**

	SAPD1	SAPD2	SAPD3	SAPD4	SAPD5	SAPD6	SAPD
SAPD1 Pearson Correlation	1	.289	.452**	.327	.289	.548**	.757**
Sig. (2-tailed)		.092	.006	.055	.092	.001	.000
N	35	35	35	35	35	35	35
SAPD2 Pearson Correlation	.289	1	.147	.147	.239	.239	.538**
Sig. (2-tailed)	.092		.398	.398	.167	.167	.001
N	35	35	35	35	35	35	35
SAPD3 Pearson Correlation	.452**	.147	1	.167	.025	.516**	.608**
Sig. (2-tailed)	.006	.398		.339	.889	.002	.000
N	35	35	35	35	35	35	35
SAPD4 Pearson Correlation	.327	.147	.167	1	.516**	.270	.640**
Sig. (2-tailed)	.055	.398	.339		.002	.116	.000
N	35	35	35	35	35	35	35
SAPD5 Pearson Correlation	.289	.239	.025	.516**	1	.112	.571**
Sig. (2-tailed)	.092	.167	.889	.002		.521	.000

N	35	35	35	35	35	35	35
SAPD6 Pearson Correlation	.548**	.239	.516**	.270	.112	1	.703**
Sig. (2-tailed)	.001	.167	.002	.116	.521		.000
N	35	35	35	35	35	35	35
SAPD Pearson Correlation	.757**	.538**	.608**	.640**	.571**	.703**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	
N	35	35	35	35	35	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Lampiran 8.**

**Validitas Variabel Pemahaman Akuntansi**

**Correlations**

	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9	PA10	PA
PA1											
Pearson Correlation	1	.808**	.591**	.582**	.582**	.382*	.461**	.666**	.348*	.548**	.799**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.024	.005	.000	.041	.001	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PA2											
Pearson Correlation	.808**	1	.409*	.658**	.535**	.327	.289	.614**	.284	.337*	.704**
Sig. (2-tailed)	.000		.015	.000	.001	.055	.093	.000	.098	.048	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PA3											
Pearson Correlation	.591**	.409*	1	.380*	.611**	.660**	.726**	.712**	.300	.657**	.815**
Sig. (2-tailed)	.000	.015		.025	.000	.000	.000	.000	.080	.000	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PA4											
Pearson Correlation	.582**	.658**	.380*	1	.542**	.487**	.428*	.662**	.495**	.412*	.761**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.025		.001	.003	.010	.000	.002	.014	.000



	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PA5	Pearson Correlation	.582**	.535**	.611**	.542**	1	.487**	.314	.777**	.495**	.535**	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.001		.003	.066	.000	.002	.001	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PA6	Pearson Correlation	.382*	.327	.660**	.487**	.487**	1	.601**	.485**	.314	.450**	.703**
	Sig. (2-tailed)	.024	.055	.000	.003	.003		.000	.003	.067	.007	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PA7	Pearson Correlation	.461**	.289	.726**	.428*	.314	.601**	1	.548**	.264	.535**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.005	.093	.000	.010	.066	.000		.001	.125	.001	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PA8	Pearson Correlation	.666**	.614**	.712**	.662**	.777**	.485**	.548**	1	.248	.614**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.001		.150	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PA9	Pearson Correlation	.348*	.284	.300	.495**	.495**	.314	.264	.248	1	.409*	.561**
	Sig. (2-tailed)	.041	.098	.080	.002	.002	.067	.125	.150		.015	.000

	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PA10	Pearson Correlation	.548**	.337*	.657**	.412*	.535**	.450**	.535**	.614**	.409*	1	.738**
	Sig. (2-tailed)	.001	.048	.000	.014	.001	.007	.001	.000	.015		.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PA	Pearson Correlation	.799**	.704**	.815**	.761**	.793**	.703**	.698**	.852**	.561**	.738**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Lampiran 9.**

**Validitas Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan**

**Correlations**

		KPPP1	KPPP2	KPPP3	KPPP4	KPPP5	KPPP
KPPP1	Pearson Correlation	1	.433**	.194	.612**	.600**	.775**
	Sig. (2-tailed)		.009	.264	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
KPPP2	Pearson Correlation	.433**	1	.548**	.715**	.373*	.838**
	Sig. (2-tailed)	.009		.001	.000	.028	.000
	N	35	35	35	35	35	35
KPPP3	Pearson Correlation	.194	.548**	1	.266	.141	.587**
	Sig. (2-tailed)	.264	.001		.122	.419	.000
	N	35	35	35	35	35	35
KPPP4	Pearson Correlation	.612**	.715**	.266	1	.318	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.122		.063	.000

	N	35	35	35	35	35	35
KPPP5	Pearson Correlation	.600**	.373*	.141	.318	1	.665**
	Sig. (2-tailed)	.000	.028	.419	.063		.000
	N	35	35	35	35	35	35
KPPP	Pearson Correlation	.775**	.838**	.587**	.795**	.665**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 10.

Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Correlations

		AKIP1	AKIP2	AKIP3	AKIP4	AKIP5	AKIP6	AKIP7	AKIP8	AKIP9	AKIP10	AKIP
AKIP 1	Pearson Correlation	1	.830**	.600**	.545**	.660**	.660**	.490**	.776**	.257	.771**	.850**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000	.003	.000	.137	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AKIP 2	Pearson Correlation	.830**	1	.770**	.480**	.712**	.828**	.539**	.712**	.421*	.944**	.933**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.004	.000	.000	.001	.000	.012	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AKIP 3	Pearson Correlation	.600**	.770**	1	.480**	.480**	.828**	.656**	.480**	.539**	.715**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.004	.004	.000	.000	.004	.001	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AKIP 4	Pearson Correlation	.545**	.480**	.480**	1	.533**	.300	.354*	.417*	.236	.545**	.630**
	Sig. (2-tailed)	.001	.004	.004		.001	.080	.037	.013	.173	.001	.000

	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AKIP 5	Pearson Correlation	.660**	.712**	.480**	.533**	1	.533**	.354*	.533**	.354*	.776**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.001		.001	.037	.001	.037	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AKIP 6	Pearson Correlation	.660**	.828**	.828**	.300	.533**	1	.707**	.650**	.471**	.776**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.080	.001		.000	.000	.004	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AKIP 7	Pearson Correlation	.490**	.539**	.656**	.354*	.354*	.707**	1	.471**	.167	.607**	.688**
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.000	.037	.037	.000		.004	.339	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AKIP 8	Pearson Correlation	.776**	.712**	.480**	.417*	.533**	.650**	.471**	1	.118	.660**	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.013	.001	.000	.004		.500	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AKIP 9	Pearson Correlation	.257	.421*	.539**	.236	.354*	.471**	.167	.118	1	.373*	.506**
	Sig. (2-tailed)	.137	.012	.001	.173	.037	.004	.339	.500		.027	.002

	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AKIP	Pearson	.771**	.944**	.715**	.545**	.776**	.776**	.607**	.660**	.373*	1	.924**
10	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.027		.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AKIP	Pearson	.850**	.933**	.843**	.630**	.765**	.870**	.688**	.750**	.506**	.924**	1
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Lampiran 11.**  
**UJI RELIABILITAS**

**Reliabilitas Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**  
**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	6



**Lampiran 12.****Reliabilitas Variabel Pemahaman Akuntansi****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.909	10

### Lampiran 13.

#### Reliabilitas Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.784	5

**Lampiran 14.**

**Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.927	10

**Lampiran 15.**  
**UJI ASUMSI KLASIK**

**Uji Normalitas Data**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		SAPD	PA	KPPP	AKIP
N		35	35	35	35
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	26.1429	44.3143	22.5429	45.6000
	Std. Deviation	1.84937	3.68440	1.85255	3.90475
Most Extreme Differences	Absolute	.189	.159	.158	.208
	Positive	.189	.159	.158	.147
	Negative	-.123	-.156	-.156	-.208
Kolmogorov-Smirnov Z		1.117	.939	.935	1.231
Asymp. Sig. (2-tailed)		.165	.342	.346	.097
a. Test distribution is Normal.					

### Lampiran 16.

#### Uji Multikolinearitas

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.919 <sup>a</sup>	.845	.830	1.61112

a. Predictors: (Constant), KPPP, SAPD, PA

##### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437.933	3	145.978	56.238	.000 <sup>a</sup>
	Residual	80.467	31	2.596		
	Total	518.400	34			

a. Predictors: (Constant), KPPP, SAPD, PA

b. Dependent Variable: AKIP

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.690	4.362		-1.763	.088		
	SAPD	.662	.192	.314	3.443	.002	.603	1.658
	PA	.394	.127	.372	3.115	.004	.351	2.849
	KPPP	.821	.215	.389	3.810	.001	.480	2.085

a. Dependent Variable:

AKIP

## Lampiran 17.

### Uji Heterokedastisitas

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.325 <sup>a</sup>	.106	.019	.87360

a. Predictors: (Constant), KPPP, SAPD, PA

b. Dependent Variable: ABS

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.792	3	.931	1.219	.319 <sup>a</sup>
Residual	23.658	31	.763		
Total	26.450	34			

a. Predictors: (Constant), KPPP, SAPD, PA

b. Dependent Variable: ABS

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.422	2.365		-.601	.552
SAPD	.066	.104	.137	.628	.535
PA	.087	.069	.363	1.267	.214
KPPP	.213	.117	.448	1.826	.077

a. Dependent Variable: ABS

## Lampiran 18.

### UJI HIPOTESIS

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.919 <sup>a</sup>	.845	.830	1.61112

a. Predictors: (Constant), KPPP, SAPD, PA

b. Dependent Variable: AKIP

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437.933	3	145.978	56.238	.000 <sup>a</sup>
	Residual	80.467	31	2.596		
	Total	518.400	34			

a. Predictors: (Constant), KPPP, SAPD, PA

b. Dependent Variable: AKIP

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.690	4.362		-1.763	.088
	SAPD	.662	.192	.314	3.443	.002
	PA	.394	.127	.372	3.115	.004
	KPPP	.821	.215	.389	3.810	.001

a. Dependent Variable: AKIP

**Lampiran 19.**

**NAMA-NAMA SKPD DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA SKPD</b>
1.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2.	SEKRETARIAT DEWAN
3.	DINAS PENDIDIKAN
4.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	DINAS KESEHATAN
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
9.	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTERNAKAN (DKPP)
10.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)
11.	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN ADMINISTRASI
12.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
13.	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN PARIWISATA
14.	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
15.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
16.	BADAN PEMBERADAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA
17.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA ( BPPKB )
18.	BADAN KETAHANAN PANGAN ( BKP )
19.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD )
20.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP ( BLH )
21.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD )
22.	BADAN PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K)
23.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN



	TERPADU (BPMP2T)
24.	INSPEKTORAT
25.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
26.	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
27.	KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
28.	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
29.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
30.	SEKRETARIAT KORPRI
31.	CAMAT KARANG TINGGI
32.	CAMAT TALANG EMPAT
33.	CAMAT PONDOK KELAPA
34.	CAMAT TABA PENANJUNG
35.	CAMAT PONDOK KUBANG
36.	CAMAT MERIGI KELINDANG

# **L A M P I R A N**